BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik secara mikro maupun makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Suatu negara akan dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah jumlah kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro, 2010)

Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia, pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara absolut dan presentase penduduk miskin meningkat sangat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,34% pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% pada tahun 1998. Pada saat krisis terjadi penambahan penduduk miskin (banyak penduduk menjadi miskin mendadak) sebanyak 27 juta jiwa atau 120%, suatu jumlah yang luar biasa besar. Jumlah penduduk miskin ini secara absolut hampir mendekati jumlah penduduk miskin

pada tahun 1976 yang berjumlah 54,2 juta jiwa. Meskipun krisis ekonomi telah berlalu, namun pada tahun 2003 jumlahnya tetap naik, yaitu 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Mahri, 2006).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sejak dulu hingga sekarang tidak kunjung selesai. Persoalaan ini diibaratkan lingkaran setan yang tidak pernah menemukan ujung dan pangkalnya. Siklus kemiskinan diperngaruhi oleh banyak faktor yang berhubungan satu sama lain. Menurut *word bank* salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapataan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, tempat tinggal kesehataan dan pendidikan yang dapat diterima. Oleh karena itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pendidikan kesehatan pengangguran dan masalah lain yang secara ekspilit berkaitaan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

Salah satu indikator utama keberhasilaan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini menunjukan salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Hidayat, 2007). Jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya masih sangat besar. Berdasarkan data dari BPS yang

dikeluarkan pada bulan Maret 2019 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai 2019 jumlahnya sangat besar. Tercatat pada Tahun 2015 berjumlah 208,12 juta penduduk miskin dan pada tahun 2016 hingga 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami penurunan. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya. Berikut adalah jumlah kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang terjadi selama tahun 2015 sampai tahun 2019.

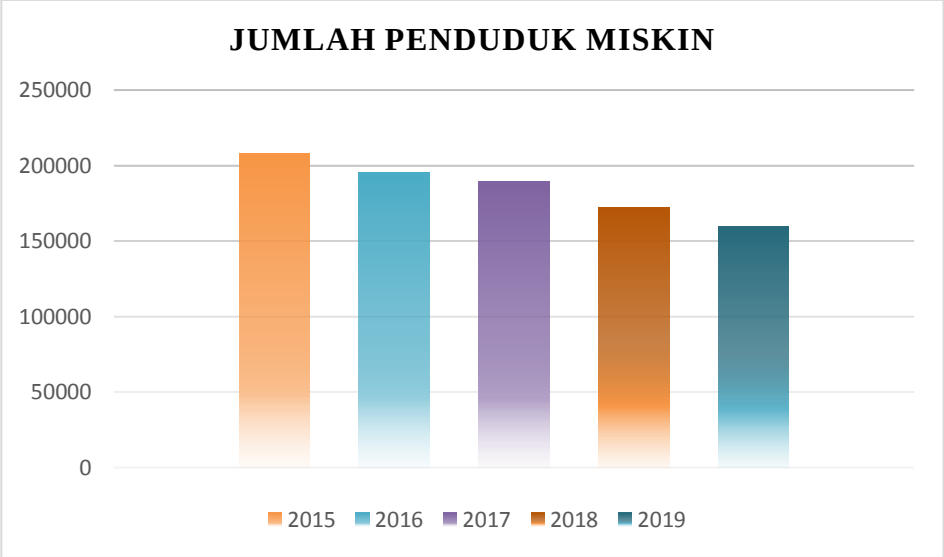

Sumber : BPS,Statistik Indonesia, 2019, diolah.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Di Kota Taikmalaya
Tahun 2015-2019

Secara garis besar, tingkat kemiskinan di Kota Tasikmlaya pada periode tahun 2015-2019 senantiasa dapat menurun setiap tahunnya, seperti terlihat pada Gambar 1.1 Menurut data tersebut, 12 % penduduk Kota Tasikmalaya dikategorikan hidup di garis kemiskinan. Faktor penyebab masih banyaknya

warga miskin di Kota Tasikmalaya terjadi karena adanya pemekaran di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Kabupaten dan Kota.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dilakukannya pembangunan ekonomi yang ditunjukkan di titik-titik yang masih ditemukan banyak warga miskin di daerah-daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi. Karena dalam pembangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan terkait juga dengan meningkatkan kapasitas dasar manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang merupakan kewajiban pemerintah pemerintah untuk menyediakan barang publik. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melalukan pengeluaraan atau investasi yang ditunjukkan untuk pembangunan manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendsar. Menurut Meir dan Rauch (dalam Brata, 2002) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kota Tasikmalaya sebagai kota yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi memiliki pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan yang fulktuatif. Pada tahun 2015 Kota Tasikmalaya memiliki pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 494 miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 608 miliar, tahun 2017

sebesar Rp. 500 miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 536 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp. 535 miliar. Hal tersebut merupakan peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Berikut adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan (rupiah) pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019.

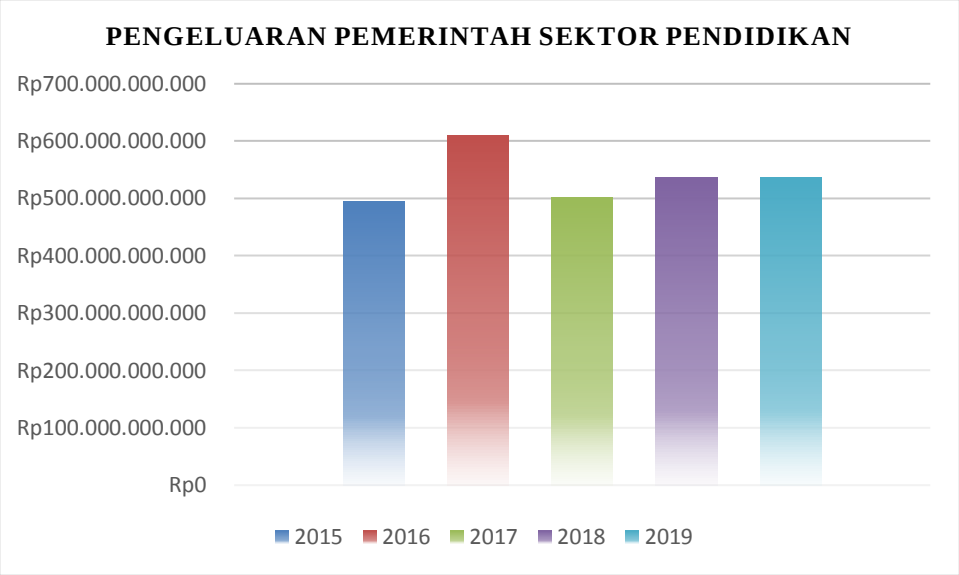

Sumber: Realisasi-anggaran. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Ri.

Gambar 1.2
Pengeluaraan Pemerintah Untuk Sektor Pendidikan (rupiah)
Periode 2015-2019

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di Kota Tasikmalaya berfluktuasi pada pengamatan data tahun 2015 s.d 2019. Kenaikan pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar Rp. 608 miliar dan terendah tahun 2015 sebesar Rp. 494 miliar.

Selain Pendidikan, Kesehatan juga merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. (Septiana, dkk 2015). Kota Tasikmalaya sebagai kota yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi memiliki pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan

yang fulktuatif. Berikut adalah Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kota Tasikmalaya yang terjadi selama tahun 2015-2019.

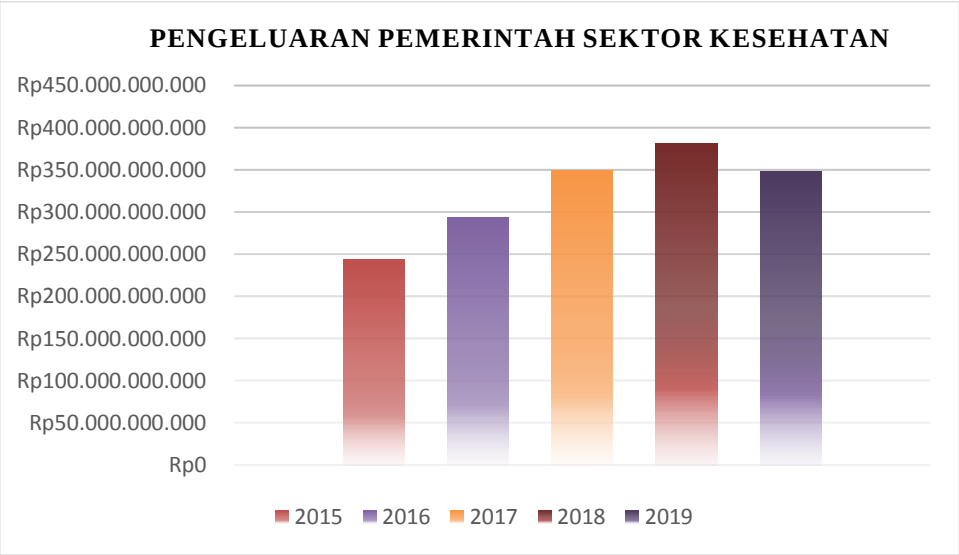

Sumber: Realisasi-anggaran. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Ri.

Gambar 1.3
Pengeluaraan Pemerintah Sektor Kesehatan (rupiah)
Periode 2015-2019

Anggaran Pemerintah Untuk Sektor Kesehatan di Kota Tasikmalaya dalam periode 2015-2019 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengeluaraan pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 381 miliar dan pengeluaraan pemerintah terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 243 miliar.

Kemampuan dan kekuatan pemerintah tergantung pada pengaturan kelembagaan, hukum, peraturan, kondisi politik dan keadaan eksternal. Kondisi politik memainkan peran utama dalam penyusunan perencanaan terkait dengan masalah Kemiskinan. Karena itulah pemerintah juga berperan sebagai penambah nilai permintaan sumber daya.

Salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana dalam anggaran belanja daerah, dimana terdapat beberapa sektor dianataranya anggaran pendidikan dan kesehatan. Besarnya anggaran pada setiap sektor bermacam-macam, naiknya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan yang terpenting adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia agar tujuan tersebut dapat tercapai diantaranya melalui anggaran APBD anggaran pendidikan dan APBD anggaran kesehatan. Oleh karena itu dalam melihat tingkat kemiskinan di suatu daerah kita harus melihat alokasi pengeluaran daerahnya, apakah pengeluaran tersebut efektif dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada suatu daerah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan sangat erat kaitanya dengan kemiskinan, menurut Suparmoko (1996), pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada giliranya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah jumlah pengeluaran pemerintah sektor ekonomi Kota Tasikmalaya yang terjadi selama tahun 2015 sampai tahun 2019.

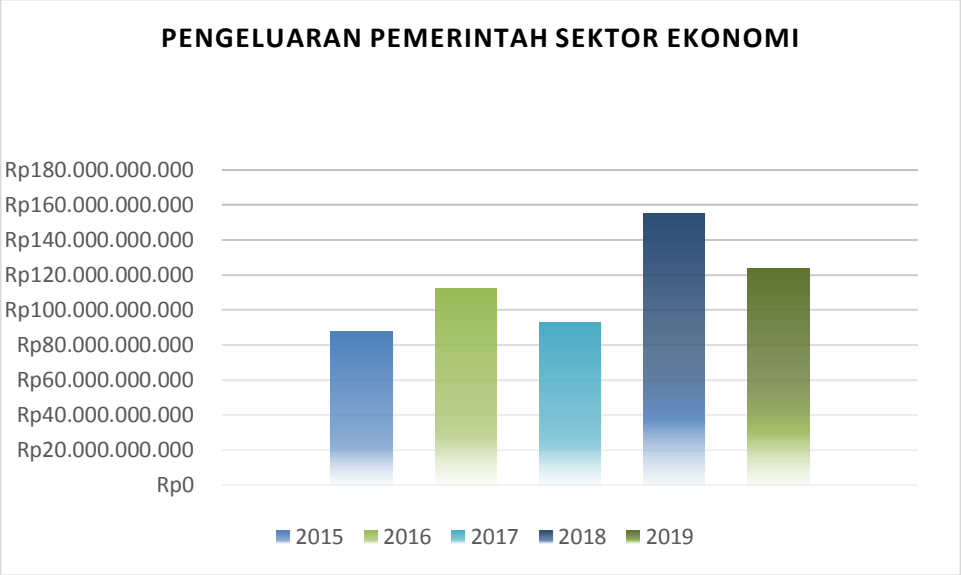

Sumber: realisasi-anggaran. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Ri.

Gambar 1.4
Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi (rupiah)
Periode 2015-2019

Pada Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami naik turun, seperti pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah sektor ekonomi tertinggi di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 155 miliar. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2015 sebesar Rp. 87 miliar.

Melihat kenyataan angka kemiskinan tersebut maka peran dan tanggung jawab yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi semakin penting karena dituntut mampu melakukan fungsi alokasi atas semua sumber daya dan dana yang dimiliki, untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia. Berdasarkan

uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **'' ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMSIKINAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007-2019''.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaraan Pemerintah Sektor Ekonomi terhadap Kemiskinan secara parsial di Kota Tasikmalaya Tahun 2007 - 2019.
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaraan Pemerintah Sektor Ekonomi terhadap Kemiskinan secara bersama-sama di Kota Tasikmalaya Tahun 2007 - 2019.

1.3 Tujuan Penelitiaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Mengetahui bagaiamana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pemerintah Sektor Ekonomi terhadap Kemiskinan secara parsial di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2019
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehataan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi terhadap Kemiskinaan secara bersama-sama di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2019

1.4 Kegunaan Hasil Penelitiaan

Penelitiaan ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu :

A. Kegunaan Akademis

1. Media untuk mencoba menerapkan pemahamaan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah untuk menganalisa fenomena variabel ekonomi dalam kehidupan nyata.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu khususnya Ekonomi Pembangunan.

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangaan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

B. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalaan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi dan Kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, pengambilan data penelitian ini adalah disitus resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tasikmalaya dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
Tahun 2020

Keterangan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																						
Bimbingan			■	■	■	■	■	■	■	■														
Seminar Usulan Penelitian															■									
Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■																
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																						■		